



BAB VI KESIMPULAN

6.1. Pengantar

Studi empiris mengenai proses transfer kebijakan di negara-negara berkembang saat ini masih terbatas karena sebagian besar studi terpusat pada model dan lokus transfer kebijakan di negara-negara maju (Stone, 1999; Randaelli, 2000; Wolman & Page, 2002; Lodge, 2003; Ferner, et al., 2005, Bulmer & Padgett, 2005; Martinez, 2005; Dunop, 2009; Pratt, 2009; Prince, 2010; Stead, 2012; Marier, 2016; Boyd, 2017). Studi terdahulu juga didominasi dengan studi konseptual. Hal ini menyebabkan kelemahan dalam memahami studi transfer kebijakan secara empiris. Studi ini menjawab tantangan (Evans & Davies, 1999; James & Lodge, 2003; Evans, 2009; Benson & Jordan, 2011 dan Dussauge-Laguna, 2012) yang menantang penelitian selanjutnya menekankan studi empiris. Studi ini menjadikan Pemerintah Kota Semarang sebagai lokus penelitian. Hal ini merujuk pada Stone (2017) bahwa proses transfer kebijakan telah berkembang secara transnasional tidak lagi antar negara, namun translasi global ke lokal disertai dengan kendali otoritatif dari aktor non-negara, sehingga riset ini menarik dan berkontribusi untuk merumuskan proses transfer kebijakan di negara berkembang.

6.2. Temuan Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

6.2.1. Proses Transfer Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang

Proses transfer terjadi atas dorongan internal dari penerima transfer disertai dengan dorongan eksternal dari pemberi transfer. Proses translasi merupakan ruang penerima transfer merespon dorongan eksternal. Ruang translasi yang terbuka membuat proses transfer semakin mudah terjadi. Secara global adaptasi perubahan iklim ini secara mengikat harus diterapkan anggota UNFCCC termasuk Indonesia. Pemerintah Kota Semarang merespon agenda global dengan penerimaan secara sukarela dan simultan. Terjadi kesesuaian antara ide yang ditransfer dengan kebutuhan konteks kebijakan, sehingga proses transfer kebijakan terbentuk secara sukarela dan penyesuaian. Keberhasilan pemindahan objek transfer sangat ditentukan oleh mandat pimpinan dan kekuatan *championship* dalam mengusahakan proses transfer. Mandat berkaitan dengan kekuatan kepemimpinan dalam memprioritaskan agenda kebijakan, sedangkan peran *championsip* mampu



mendorong birokrasi mengimplementasikan hasil transfer kebijakan yang ditranslasikan secara kontekstual. Proses transfer kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang terjadi dengan motivasi upaya mengendalikan banjir, rob dan permasalahan penurunan tanah. Kebutuhan melakukan transfer kebijakan dilakukan untuk membuka peluang meningkatkan kemampuan sumberdaya untuk melakukan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang lebih besar.

6.2.2. Translasi Transfer Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang

Proses translasi aksi adaptasi perubahan iklim ke Kota Semarang merupakan proses inspirasi semu. Merujuk pada Stone (2012) menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik adaptasi perubahan iklim sebenarnya tidak dipindahkan karena Pemerintah Kota Semarang telah melakukan aksi tersebut jauh sebelum istilah adaptasi perubahan iklim dipopulerkan oleh dunia. Pemerintah dan Masyarakat Kota Semarang sejak awal sudah memaknai dari awal bahwa adaptasi perubahan iklim adalah upaya pengendalian banjir, rob dan penurunan tanah. Proses internal ini secara momentum bertemu dengan agenda global yang sejalan. Proses ini sejalan dengan Hulme (2005) bahwa sebenarnya agenda global bermakna sangat luas dan kebijakan internal pemerintah adalah praktik yang tidak dapat dialihkan karena sudah tumbuh sejak lama dari sistem hukum, pendidikan, sosial dan karakter kewilayahan.

6.3. Keterbatasan, Kontribusi dan Penelitian Selanjutnya

6.3.1. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kelemahan. Pertama dari sisi metodologi, riset ini dilakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data wawancara. Tantangan dalam menentukan informan yang terkait dengan bidang yang diajukan seringkali berhadapan dengan pilihan dan instruksi pendelegasian dari birokrasi yang menentukan secara perspektif kelembagaan dan instuksi administratif, hal ini terkadang membuat peneliti kesulitan memperoleh data dari sumber aslinya karena sifatnya hanya perwakilan. Situasi ini juga dilengkapi dengan kompleksitas rotasi kepegawaian di wilayah Pemerintah Kota Semarang yang massif sejak 2010 karena factor kepemimpinan. hal ini berimplikasi pada variasi data yang diperoleh peneliti sangat bergantung pada perspektif dan background informan. Tidak jarang beberapa



pertanyaan dijawab sangat situasional namun tidak merefleksikan maksud dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini berbasis pada telusur dokumen pemerintah yang diterbitkan dan telah ada dalam memotret fenomena dan bukti transfer kebijakan untuk memastikan validitas data dan alur informasi. Hal ini peneliti kombinasikan dan kroscek kembali dengan dukungan data dokumen untuk memastikan validitas data. Kedua, secara substansi penelitian ini terbatas pada lokus daerah Kota Semarang sebagai lokus yang khusus untuk memotret sebagian aksi adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional dan global, namun tetap saja riset ini tidak bisa digeneralisasikan untuk praktik transfer kebijakan adaptasi perubahan iklim di tempat lain karena memiliki latarbelakang, sejarah, kronologi dan konteks yang berbeda. Ketiga, riset ini mengalami keterbatasan dalam merefleksikan perkembangan teoritik penelitian translasi transfer kebijakan, hal ini karena pijakan kerangka riset translasi dalam studi terdahulu belum dikembangkan secara matang. Keempat, spesifikasi aksi adaptasi perubahan iklim secara substantial dijabarkan kedalam aksi-aksi spesifik yang sangat beragam, hal ini membuat pembahasan dalam penelitian ini cenderung tidak detail pada setiap implikasi transfer di setiap bidang kluster aksi adaptasi.

Dengan demikian, penelitian masa depan dapat melakukan kombinasi jenis penelitian yaitu mix penelitian kualitatif dengan kuantitatif untuk memperdalam variasi hasil penelitian. Kemudian, perlu untuk mengkaji fenomena proses transfer kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam konteks nasional melalui komparasi multi kasus sehingga berimplikasi mempertajam generalisasi dari temuan penelitian. Penelitian yang akan datang juga perlu secara spesifik mengkaji tipe kepemimpinan dalam proses transfer kebijakan, hal ini berpeluang menghasilkan data terkait perbedaan kepemimpinan menentukan perbedaan proses transfer dan translasi kebijakan.

6.3.2. Kontribusi Penelitian

6.3.2.1. Kontribusi Teoritis

Disertasi ini berkontribusi secara teoritis untuk mengembangkan studi kebijakan public dengan melengkapi kekurangan studi terdahulu yang telah dilakukan oleh temuan utama dari studi Dolowitz & Marsh (2000) adalah dasar kerangka analisis transfer kebijakan, Evans (2009; 2010) Perspektif multilevel, Stone (2012) terkait Konseptual Transfer dan Terjemahan Kebijakan, Porto de



Oliveira & Pal (2018) perkembangan riset transfer kebijakan yang dilakukan di negara maju. Temuan studi ini mengembangkan studi transfer kebijakan secara empiris dengan menekankan dua hal yaitu: proses transfer kebijakan terjadi secara sukarela ketika terjadi kesesuaian antara agenda global dengan kebutuhan local. Hal ini didukung adanya proses translasi transfer kebijakan yang kontekstual sehingga membuka ruang pemerintah local untuk mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan masalah adaptasi perubahan iklim yang dihadapi. Adapun temuan studi ini merefleksikan praktik transfer kebijakan di negara berkembang yang berbeda dari perkembangan studi yang ada.

6.3.2.2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis dari disertasi ini ada tiga. Kontribusi pertama terkait dengan dasar penentuan prioritas transfer kebijakan bagi perumus kebijakan agar dilakukan berbasis data. Hal ini akan berimplikasi pada setiap proses perencanaan pembangunan daerah ditentukan berdasarkan urgensi kebutuhan kondisi daerah. Proses identifikasi masalah public yang menjadi tahap awal menentukan prioritas kebijakan sebaiknya dikaji dengan basis data yang mendalam. Proses ini secara langsung akan menghasilkan:

1. Analisis masalah public yang kontekstual
2. Kronologi munculnya suatu perumusan kebijakan yang runtut
3. Penentuan pilihan-pilihan prioritas dan alternatif solusi kebijakan disesuaikan dengan permasalahan public yang dihadapi
4. Penyelesaian masalah kebijakan bukan berdasarkan pada praktik terbaik dinegara lain, namun translasi/penyesuaian dengan konsisi wilayah.

Kontribusi praktis kedua adalah perumus kebijakan perlu melakukan terhadap komparasi praktik terbaik yang pernah terjadi di tempat lain. Proses ini menuntun pembuat kebijakan untuk mengambil Pelajaran dari praktik terbaik/ kebijakan yang ada, atau kemungkinan-kemungkinan kebijakan serupa yang gagal di tempat lain. Hal ini akan memberikan pertimbangan yang seimbang untuk merumuskan kebijakan yang sesuai analisis permasalahan public yang dihadapi.

Kontribusi praktis ketiga, pemerintah pusat perlu menciptakan regulasi yang mengatur pemerintah daerah dalam upaya percepatan adaptasi perubahan iklim. Hal ini untuk mengintegrasikan dan mensinergikan langkah adaptasi perubahan iklim yang kontekstual, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan



daerah. Dengan demikian proses transfer kebijakan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan berdasarkan data dan kesesuaian dengan lokalitas.

6.3.3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang untuk riset lanjutan terutama berkaitan dengan topik:

1. Ukuran keberhasilan transfer kebijakan di Kota Semarang. Hal ini didasarkan pada banyak kebijakan dan program yang dibuat sebagai turunan dari adaptasi perubahan iklim untuk mengintervensi permasalahan utama banjir, rob, penurunan tanah dan kenaikan air laut. Hal ini berbanding terbalik dengan realitas capaian program dengan fenomena permasalahan yang terjadi, pasalnya semakin banyak intervensi dan kerjasama global yang dilakukan tetapi fenomena permasalahan utama tersebut bukan berkurang atau terkendalikan, namun semakin tahun, fenomena banjir di Kota Semarang makin tinggi dengan dampak yang makin massif, kenaikan laju penurunan tanah dan muka air laut yang terus terjadi. Hal ini penting untuk melakukan riset lanjutan untuk mengidentifikasi ukuran keberhasilan transfer kebijakan dan menemukan instrumen yang tepat untuk mengukur keberhasilan tersebut.
2. Penting untuk melihat lebih jauh Bagaimana para birokrat atau pelaku kebijakan di Kota Semarang dalam melakukan Translasi kebijakan pada tiap periode pemerintahan. Sebagai bukti, sejauh ini Kota Semarang telah melaksanakan 4 periode pemerintahan dengan 4 dokumen RPJMD. Dengan inti permasalahan kota yang relative sama, namun tiap periode pemerintahan memiliki arus intervensi kebijakan yang berbeda yang tercermin dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk permasalahan yang sama di Kota Semarang.
3. Persepsi Resiliensi pemerintah dan masyarakat Kota Semarang terhadap bencana. Sebagai contoh dalam temuan wawancara menyebutkan bahwa masyarakat telah terbiasa dengan fenomena kenaikan air laut, mereka bertahan dan terus meninggikan bangunan padahal fenomena ini tiap tahun terus dilakukan. Mereka bukan takut terhadap bencana namun semacam telah menyesuaikan diri dengan alam. Hal ini penting untuk mengetahui



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Rasionalitas Proses Transfer Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang

NANIK LESTARI, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, S.U., MURP.; Dr. Ely Susanto, MBA.; Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

persepsi resiliensi dari sudut pandang mereka.